

OPTIMALISASI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH

Muhammad Farhan Selian

NPP. 30.0053

Asdaf Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Prodi Manajemen keamanan dan keselamatan publik

Email : 30.0053@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Muh.Ilham, M.Si

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The disaster event that occurred in Central Aceh Regency throughout 2022 yesterday caused several locations in Central Aceh Regency to be made disaster-prone areas and damage to infrastructure so that improvements need to be made. The Regional Government, especially Bappeda and BPBD, provides stimulant funds and shelter for residents affected by disasters. Disaster management after a disaster is a step to restore the situation as before. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the performance of BPBD in flood disaster management in Belitung Regency. **Method:** The research design used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. As well as data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusions. Interview with 6 informants. **Results:** This study shows that Optimization of Data Collection of damage to infrastructure damaged by disasters has not been achieved, so local governments must coordinate with the community on the issue of clarity of the data obtained to be appropriate as appropriate. The main obstacle is that many people are not in the location so that the data collection is only as it is. **Conclusion:** Observation of the implementation process of rehabilitation and reconstruction after the landslide disaster fiber obstacles that hinder the completion of the program implementation, then the implementation of rehabilitation and reconstruction after the earthquake disaster has not reached the specified target because there are still many problems in the field. As well as in data collection that is not done properly, it causes several times re-data collection from the government to the community, and there are still many shortcomings that need to be considered to be corrected.

Keywords: disaster, data collection, stimulant

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peristiwa Bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang tahun 2022 kemarin menyebabkan beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Tengah di jadikan kawasan rawan bencana dan kerusakan pada infrastruktur sehingga perlu dilakukan perbaikan. Pemerintah Daerah khususnya Bappeda dan BPBD melakukan pemberian bantuan dana stimulan dan huntap bagi warga terdampak bencana, penanganan bencana setelah terjadinya bencana merupakan langkah mengembalikan keadaan seperti semula. **Tujuan:** Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Belitung. **Metode:** Desain penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Wawancara dengan 6 orang informan. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan Optimalisasi Pendataan kerusakan infrastruktur yang rusak akibat bencana belum tercapai, sehingga pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan masyarakat masalah kejelasan data yang diperoleh agar sesuai dengan semestinya. Kendala yang paling utama yaitu banyak masyarakat yang tidak berada di lokasi sehingga pendataan yang dilakukan hanya apa adanya. **Kesimpulan:** Pengamatan terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor serit kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi belum mencapai target yang di tentukan karena masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki

Kata kunci : bencana, pendataan, stimulan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor alam, faktor nonalam dan faktor manusia itu sendiri sehingga bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan-kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak-dampak psikologis. Jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia setiap tahun tidaklah sedikit. Berdasarkan data perhitungan kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.929 bencana, ini merupakan jumlah kejadian yang sangat banyak dimana bencana sebanyak ini memiliki risiko korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Salah satu bencana yang memiliki risiko dan ancaman sangat berbahaya bagi manusia dan harta benda adalah Tanah Longsor. pada tahun 2020 tanah longsor terjadi sebanyak 573 kali dimana ini merupakan angka kejadian bencana yang sangat tinggi. Tanah longsor memiliki kerentanan dan ancaman yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa dan harta benda.

Tanah longsor adalah sebuah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tanah longsor merupakan bentuk perpindahan massa alami dan menyebar dalam jumlah besar dalam waktu singkat (Setiawan dkk., 2017). Dalam hal topografi, daerah yang rawan longsor adalah lereng gunung dan bukit, dengan lereng sedang hingga curam, adapun Gempa bumi dan aktivitas manusia mempengaruhi stabilitas lereng (Subekti, 2012). Ada banyak jenis tanah longsor, tergantung penyebabnya. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan bencana tanah longsor, yaitu yang pertama faktor pendorong dan yang kedua faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi material sehingga material didorong untuk bergerak. Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material bergerak dan 4 tanah longsor terjadi. Penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi yang. Menarik tanah ke bawah. Namun ada juga faktor- faktor lain. Yang menyebabkan situasi atau sumber tanah longsor, seperti: Erosi Tanah, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Penebangan Hutan Secara

Berlebihan, dll. Tanah longsor adalah bencana alam yang membawa banyak kerugian bagi manusia dan lingkungan alam di sekitar tanah longsor. Meskipun tidak dapat dicegah, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tanah longsor.

Dampak paling signifikan yang diakibatkan tanah longsor adalah terputusnya jalur transportasi, timbulnya korban jiwa, ataupun hilangnya mata pencaharian dan merusak bangunan. Salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana tanah longsor adalah Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah merupakan Kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan aspek geografinya Aceh Tengah berada pada dataran tinggi pegunungan dan bukit barisan Aceh. Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki suhu yang berhawa sejuk dimana pada bulan April dengan suhu terpanas mencapai $25,6^{\circ}\text{C}$, dan bulan September dengan udara dingin dengan suhu yaitu $14,70^{\circ}\text{C}$.

Permasalahan yang sering terjadi pasca bencana tanah longsor ialah kurang optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat setelah terdampak bencana. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu, lambannya kerja dikarenakan proses tender yang lama, prosedur APBN, dan sumber daya lokal yang belum memadai. Perlunya peran pemerintah khususnya Bappeda dan BPBD Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pengoptimalan pelaksanaan pasca bencana dalam rangka merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana tanah longsor secara efektif dan efisien.

Permasalahan – permasalahan yang dialami itu peneliti perlu untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan judul “ **OPTIMALISASI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH**”.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kabupaten Aceh Tengah termasuk kedalam iklim tipe B, dimana musim kemarau terjadi berkisar pada bulan Januari - Juli, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Agustus-Desember. Tingginya intensitas curah hujan dapat menyebabkan maraknya peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu bencana longsor, terutama Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan daerah ini terletak di kawasan pegunungan maupun kawasan tebing-tebing. Batu yang terkena air hujan dan terpapar sinar matahari tinggi ini lama kelamaan akan lapuk menjadi tanah. Struktur geologi Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh pegunungan Barisan (Sumatra Volcanic Arc) yang terbentuk akibat adanya Lempeng Benua Asia-Eurasia, Maka dari itu secara umum struktur geologi yang ada pada Aceh Tengah meliputi batuan intrusif, batuan ekstrusif, metamorf dan batuan vulkanik. Wilayah Aceh Tengah didominasi dengan tingkat kerentanan sedang hingga tinggi dan tak sedikit wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi, wilayah ini memiliki sebagian tempat yang tergolong tidak dianjurkan untuk dijadikan pemukiman, perkebunan atau bahkan objek wisata, wilayah tersebut ialah Bebesen, Bies, Kute Panang dan Kecamatan Ketol hingga perbatasan ke Kecamatan Rusip Antara. Kecamatan Linge, Atu Lintang, Pegasing dan Jagong Jeget juga terdapat daerah yang memiliki potensi longsor yang tinggi namun hanya pada spot-spot tertentu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana sebagai berikut. Pertama, penelitian Meita Lefi Kurnia. Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Penelitian ini dibuat pada tahun 2017 Mengkaji tentang Kebijakan yang dikeluarkan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat berupa Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pasca gempa. Kedua, Penelitian Saut A. Sagala, Dian Lutfiana dan Ramanditya Wimbardana Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat: Studi Kasus Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dibuat pada tahun 2013 mengkaji Memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi Rekonstruksi diantaranya faktor partisipasi masyarakat, faktor sumber daya manusia, faktor aspek finansial dan proses rekonstruksi yang bersifat berkelanjutan. Ketiga, Penelitian Nastasia Thalia Sigarlaki, Sarah Sambiran, dan Trintje Lambey. Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana banjir Di Kecamatan Manado Menganalisis pelaksanaan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimulai dari Sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran dana, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Keempat, Penelitian A.Muhammad Fitra Optimalisasi Pendataan Penduduk Dan Kerusakan Rumah Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Menganalisis dan mengamati pelaksanaan dalam pendataan penduduk dan kerusakan rumah yang terjadi pasca bencana yang dilakukan pemerintah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokus penelitian yang dimana penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Aceh Tengah. Pada penelitian ini Mengkaji tentang pendataan kerusakan yang ditimbulkan pasca bencana namun pada penelitian ini menjelaskan tentang Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana a sektor perumahan. Penyaluran bantuan yang dilakukan tidak merata sehingga banyak terjadi kecemburuan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah sesuai yang diharapkan masyarakat, menganalisis dan mendeskripsikan kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Terdampak bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah, menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdampak bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah.

II. METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berisi kalimat hasil dari pengamatan meliputi wawancara informan, observasi lokasi, dan studi dokumentasi. Umumnya penelitian dilakukan untuk mempelajari kondisi lapangan yang dituju secara alamiah terhadap fenomena yang terjadi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2013).

Informan pada penelitian ini terdapat 6 informan yang terdiri dari Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh Tengah. Pengambilan informan yaitu dengan menggunakan metode *non-probability* sampling yaitu *sampling purposive* dan *Snowball sampling* yaitu sampel yang menentukan daftar informan dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data yang diperlukan. (Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bencana Tanah Longsor.

Akibat hujan deras pada tanggal 11 Desember 2022 sejak sore hingga pagi, menyebabkan tanah longsor menutupi badan jalan di Gampong Tami Delem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Korban terdampak berjumlah 20 KK di Gampong Tami Delem disebabkan terisolir karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4. Tidak ada pengungsi dan korban jiwa dalam kejadian ini.

a. Tujuan

Penanganan Bencana yang dilakukan pemerintah dengan perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua sarana prasarana dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Pemerintah daerah khususnya Bappeda dalam perencanaan dan Pembangunan Daerah menanggapi peristiwa ini dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan masyarakat khususnya rumah tinggal, langkah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan mengkoordinasikan dengan BPBD untuk keperluan apa saja dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Alternatif Keputusan

Penetapan zona merah di Kabupaten Aceh Tengah dengan membuat Kawasan zona berdasarkan tingkat kelawanannya, hal tersebut pemerintah harus mempersiapkan Kawasan khusus bagi masyarakat yang tempat tinggalnya rusak berat atau wilayahnya berada pada zona merah. Relokasi ialah cara pemerintah dalam menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat yang berada di kawasan zona merah, masyarakat rencananya di relokasi kelahan baru sebagai ganti atas tanah yang berada di zona merah berlupa hunian yang disebut sebagai hunian tetap (huntap), tetapi lokasi yang dimiliki masyarakat sebelumnya tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat larangan membangun di atas kawasan zona merah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah memberikan bantuan bagi korban bencana yang berada di zona merah ataupun rusak berat dilakukan secara *ex-situ*, yaitu pembangunan bangunan baru berlupa hunian khususnya bagi Warga terdampak Bencana yang disebut WTB bahwa tempat tinggalnya dibangun di tempat hasil relokasi dengan memperhatikan lokasi yang baru tersebut tingkat kerawanannya yang tidak tinggi, meskipun Aceh Tengah masuk dalam zona rawan bencana tanah longsor yang menyebabkan sebagian infrastruktur rusak di wilayah tersebut. *Ex-situ* berarti dibangun ditempat hasil relokasi. Hal ini dikhususkan untuk Warga Terdampak Bencana (WTB) yang rumahnya terkena Rusak Berat dan berada di Zona Merah. Pemerintah dalam memberikan bantuan bencana bagi WTB dengan melakukan *Ex-situ* yang berarti mereka (WTB) haruslah di relokasi ke tempat yang lebih aman beserta dibangun tempat untuk tinggal.

Pemerintah Daerah dalam mendata penduduk dan kerusakan rumah dilakukan dengan melihat peta mikro zonasi. Rumah yang mengalami kerusakan mulai dari Rusak Berat, Sedang, dan Ringan akan mendapatkan bantuan berupa dana stimulan. Rumah yang mengalami rusak berat mendapat 2 pilihan yaitu mendapat bantuan berupa Huntap atau Dana Stimulan tentunya dalam pemberian dana tersebut akan dilakukan bertahap dan dilakukan pengawasan dalam penyalurannya sebab untuk jaminan apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

c. Sumber Daya yang Membatasi

Pemberian dana stimulan dilakukan secara in-situ yaitu dibangun ditempatnya rusak seperti rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang yaitu pemerintah menilai kerusakan rumah yang telah dilaporkan dan akan dilakukan perbaikan dengan tujuan dana stimulan tersebut hanya untuk rumah yang dilaporkan bukan bangunan yang lainnya. Karena biasanya banyak masyarakat tidak melakukan perbaikan tetapi malah membangun bangunan baru. Dana stimulan yang diberikan pada rumah dengan tingkat rusak berat mendapatkan dana sebesar 50 juta atau berupa 1 Hunian Tetap, tingkat rusak sedang mendapatkan 35 juta dan ringan berupa 10 juta.

Rumah yang mengalami rusak berat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dengan melakukan pembangunan bangunan yang baru dan memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu nyaman untuk ditinggali antara lain harus memiliki atap, pintu, dan jendela yang terpenting sudah dapat dikatakan fungsional atau nyaman untuk ditinggali. penanganan bencana yang dilakukan sudah merupakan aturan dari pusat sehingga keadaan lapangan dan situasi dari pusat belum dapat menyesuaikan kebutuhan yang di lapangan secara jelas dan pada akhirnya kelompok bawah(masyarakat) diharuskan untuk mengikuti perintah dari atasan.

3.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi

Terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun beberapa kendala yang muncul di tingkat BPBD Provinsi.

1. Masalah pertama yaitu terkait dengan pendataan, dimana data yang diterima oleh pemerintah daerah BPBD belum valid. Hal ini dikarenakan masih banyaknya data yang bersifat anomali, artinya tidak adanya kesesuaian data dengan BNPA (By name By adres) yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana pada kabupaten Donggala sehingga progres implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi terlambat dalam penyelesaiannya. Hal tersebutlah yang menjadi masalah utama dalam progres pekerjaan ataupun berjalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi pada kabupaten Aceh tengah sehingga terjadinya hambatan pengerjaannya, karena jika tidak adanya dana yang disalurkan dari pemerintah pusat maka program juga tidak akan bisa berjalan.
2. Masalah kedua yaitu terkait pengadanaan, dimanah dana siap pakai dari APBN yang digunakan untuk membangun rumah tahan gempa selalu mengalami keterlambatan dalam proses penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD.
3. Masalah ketiga yaitu terkait validasi data rumah penerima bantuan, dimana pemanfaatan dana bantuan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda-berda seperti

pemanfaatan dana untuk perbaikan/pembangunan rumah dengan menggunakan pihak ketiga maupun mandiri sehingga waktu yang digunakan juga berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

3.3 Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah daerah khususnya BPBD dan Bappeda dalam menangani pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah khususnya masalah sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap dan tepat tetapi dari pihak masyarakat yang masih kurang partisipasi sehingga memperlambat jalannya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah daerah (BPBD) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi membuat beberapa kebijakan agar tercapainya target yang diinginkan antara lain yaitu memudahkan masyarakat dalam melengkapi administrasi dengan surat keterangan, melakukan monitoring serta evaluasi terkait data Warga Terdampak Bencana (WTB) yang mendapat Hupat dan Dana Stimulan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Menjelaskan secara menyeluruh teknis pelaksanaan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana penulis melaksanakan wawancara dengan bapak Imran selaku Kepala Bappeda Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2023 menyatakan bahwa: Terjadi beberapa kendala yang muncul pada pemerintah kabupaten aceh tengah selama pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertama, kesalahan komunikasi pihak BPBD terkait data. Kedua, banyak data yang tidak tervalidasi dengan baik. Ketiga, masyarakat tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, beberapa masyarakat tidak memiliki halaman atau tanah untuk membangun rumah. Beberapa kasus terjadi dimana ketika ingin membangun rumah harus ada bukti kepemilikan tanah atau surat-surat yang mendukung kepemilikan.”

Dalam observasi penulis ditemukan Permasalahan data yang diperoleh setelah pendataan dilakukan contohnya:

1. pemberian bantuan dana stimulan maupun hunian tetap hanya 1 orang saja atau 1 pemilik Kartu Keluarga (KK)
2. Refocussing dana sehingga perlu waktu dalam pencairan dana
3. Dana stimulan yang seharusnya digunakan untuk perbaikan tetapi digunakan untuk melmbangun bangunan baru
4. APBD kota tidak begitu banyak sehingga memerlukan waktu dalam pelaksanaan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)

IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenal Optimalisasi Pendataan Kerusakan Infrastruktur Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Aceh Tengah ini dapat disimpulkan:

1. Pengamatan terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tanah longsor serta kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi belum mencapai target yang di tentukan karena masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

2. Fakta yang ada dilapangan menyebutkan masih banyak ditemukan sejumlah ketidakberhasilan saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tanah longsor diantaranya kurang perhatian yang kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.
3. Karakteristik yang dimiliki oleh para agen pelaksana dapat dilihat dari ciri yang tepat serta cocok dalam pelaksanaan. Karakter dari pemerintah sudah tepat dan cocok karena sebagian agen pelaksana tentu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melayani masyarakat tanpa ada perbedaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses mengumpulkan data dan melaksanakan observasi dengan maksimal dan memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diberikan penulis kepada informan dari Penelitian ini

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada penulis yang tentunya penulis dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gelmpa 30 Septelmbelr 2009 di Sumatelra Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 76–91. <http://joelrnl.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Sagala, S. A., Lutfiana, D., & Wimbardana, R. (2013). *Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat : Studi Kasus Kabupaten Bandung , Jawa Barat. January 2013*, 1–13.
- Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Di Kota Manado (Studi di Kecamatan Paal Dua)*. 12.
- Alam, P. C., Nurcahyanto, H., & Sulandari, S. (2013). Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy...* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/3043>

<https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/1113>

Jumlah Bencana Di Indonesia Pada Tahun 2020. [Update Bencana Indonesia Tahun 2020 - BNPB](#)

https://www.acehtengahkab.go.id/media/2022.08/kabupaten_aceh_tengah_dalam_angka_2021_c1.pdf

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Pustaka Ilmu* (1st ed., Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Seri teknik riset operasional pemrograman linear / Hotniar Siringoringo; Editor: F. Wiwiek Nurwiyati

